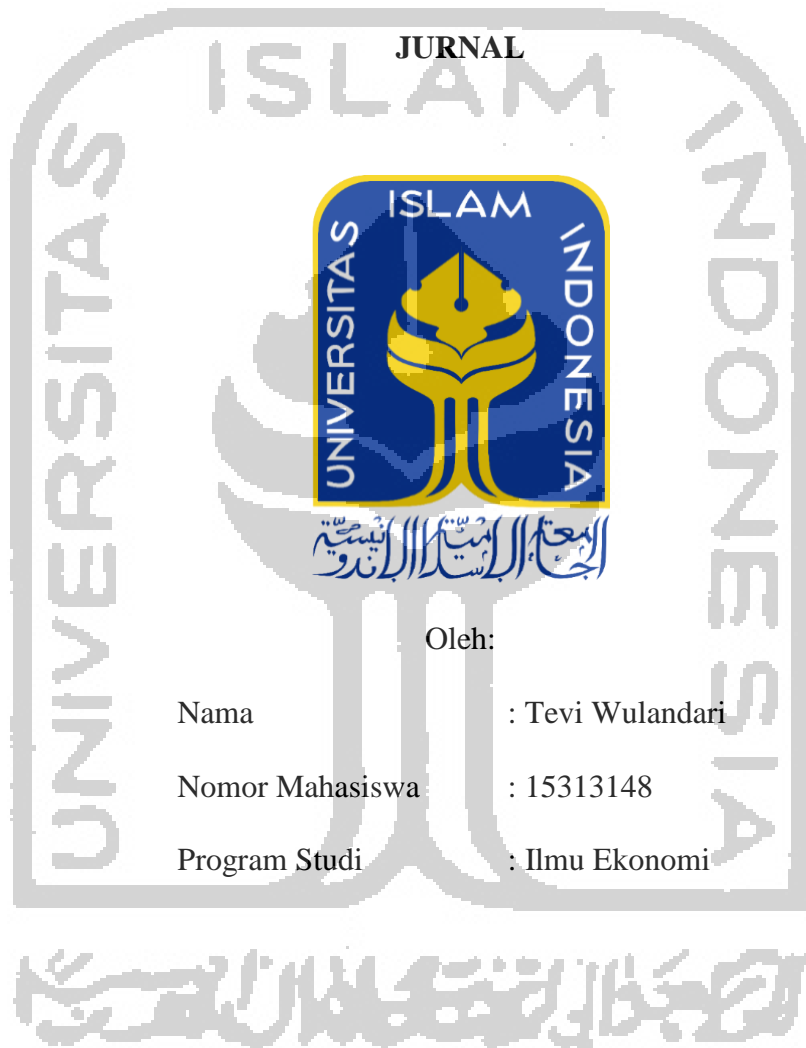


**EFISIENSI ALOKASI PENDAPATAN DAERAH PADA 4 DAERAH  
DI JAWA BARAT; KOTA BANDUNG, KABUPATEN BANDUNG,  
KABUPATEN BANDUNG BARAT, KOTA CIMAHI**



**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**YOGYAKARTA**

**2019**

**EFISIENSI ALOKASI PENDAPATAN DAERAH PADA 4 DAERAH  
DI JAWA BARAT; KOTA BANDUNG, KABUPATEN BANDUNG,  
KABUPATEN BANDUNG BARAT, KOTA CIMAH**

Tevi Wulandari

Program Studi Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta  
[15313148@students.uii.ac.id](mailto:15313148@students.uii.ac.id)

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) menganalisis daerah yang mencapai tingkat efisiensi relatif di Jawa Barat, 2) menganalisis daerah yang tidak mencapai tingkat efisiensi relatif di Jawa Barat, 3) mencari solusi untuk memperbaiki daerah yang belum mencapai tingkat efisiensi relatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, dengan pengukuran uji efisiensi relatif menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). Hasil dari penelitian ini adalah: 1) terdapat 2 daerah yang mencapai efisiensi relatif yaitu Kota Bandung dan Kota Cimahi, 2) terdapat 2 daerah yang tidak mencapai efisiensi relatif yaitu Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, 3) pemerintah harus menaikkan nominal pendapatan daerah dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu pada setiap daerah.

Kata Kunci: Efisiensi Relatif, Pendapatan Daerah, Jawa Barat, *Data Envelopment Analysis* (DEA).

## ABSTRACT

This research aims to: 1) analyze the district / city that has reached the number level of relative efficiency in West Java, 2) analyze the district / city that has not reached the number level of efficiency realtive in West Java, 3) find out solutions to improve level of relative efficiency. A method are used in this research are quantitative approach, with measurement of the relative efficiency in each district / city using Data Envelopment Analysis (DEA). The results of this research are: 1) there were 2 district / city that has reached relative efficiency, which is Kota Bandung and Kota Cimahi, 2) there were 2 district / city that has not reached relative efficiency, which is Kabupaten Bandung and Kabupaten Bandung Barat, 3) a government should increase their regional income and cut off their expenditures that unimportant for each district / city.

Keywords: Relative Efficiency, Regional Income, Jawa Barat, Data Envelopment Analysis (DEA).

## PENDAHULUAN

Suatu daerah yang mandiri dapat dikatakan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat dalam pembangunan nasional. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat yaitu dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang disebut Desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Indonesia dalam hal penyelenggaraan otonomi daerah menganut asas desentralisasi dimana pemerintah pusat memberi keleluasaan dan wewenang sendiri untuk pemerintah daerah dalam membangun daerahnya.

Peran pendapatan daerah sangat penting, dikarekanakan suatu daerah menyelenggarakan otonomi daerah dimana pemerintah daerah mengelola pembangunan ekonomi secara mandiri tanpa banyaknya bantuan dari pemerintah pusat. Maka dari itu, pengelolaan pendapatan suatu daerah harus efektif dan aktif dalam menggali sumber-sumber pendapatan suatu daerah. Selain itu suatu daerah harus mempersiapkan dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi pada daerahnya. Faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan daerah. Salah satu sumber daya finansial yang dapat mendukung fungsi pemerintahan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah dan juga pemerintah dan pembangunan daerah dapat diwujudkan hanya

apabila disertai dengan otonomi keuangan yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial haruslah independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan lain-lain.

Pembangunan di Indonesia menciptakan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah, salah satunya beberapa daerah di Jawa Barat yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi, dimana 4 daerah tersebut setiap tahunnya dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya dengan rata-rata mencapai 6% lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan Indonesia yang hanya mencapai 5% dan terus menurun dalam beberapa tahun kebelakang. Berdasarkan latar belakang berikut yang membahas tentang otonomi daerah, pencapaian pendapatan daerah (PAD) dan pembangunan daerah Kota Bandung, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **“Efisiensi Alokasi Pendapatan Daerah Pada 4 Daerah Di Jawa Barat; Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi”**

### **Rumusan Masalah**

Menganalisis tingkat efisiensi dari variabel input pendapatan daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), dan tingkat indeks pembangunan manusia (IPM).

### **Tujuan Penelitian**

Menganalisis tingkat efisiensi penerimaan pendapatan daerah pada 4 daerah di Jawa Barat yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

### **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yang dapat diperoleh yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini akan bermanfaat memberikan informasi mengenai keberlangsungan suatu kebijakan publik bagi perkembangan pada dunia ilmu ekonomi.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai acuan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengukur efisiensi sektor publik dalam hal ini pendapatan daerah meliputi

pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lain lain yang sah sebagai input terhadap pertumbuhan ekonomi yang sekaligus sebagai output, sehingga pemerintah dapat lebih efisien dan efektif dalam menentukan kebijakan.

b. Bagi Penulis

Sebagai sarana menambah pengetahuan dan wawasan dalam menerapkan teori-teori, konseptual yang ada untuk kemudian diimplementasikan di dunia nyata.

c. Bagi Pembaca

Memberikan tambahan pengetahuan dan informasi bagi pembaca, khususnya dalam determinasi efisiensi.



## **KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

### **Kajian Pustaka**

Neneng Erlina Indriati (2014) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Efisiensi Belanja Daerah Di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus Bidang Pendidikan dan Kesehatan)” dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). Hasil penelitiannya yaitu rata-rata beberapa daerah menghasilkan tingkat efisiensi dibawah 100% dalam penggunaan biaya untuk belanja daerah.

Indomas Gusti Maredh Nesia (2018) melakukan penelitian berjudul “Analisis Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Pada Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Pada Tahun 2010-2016” dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). Hasil penelitiannya yaitu menunjukkan 3 tahun dari sampel 7 tahun mengalami efisiensi sempurna yaitu pada tahun 2010, 2013, dan 2014. Serta terdapat 4 dari 7 kurun waktu yang diambil untuk sampel yang mengalami tingkat efisiensi tidak sempurna yaitu pada tahun 2011, 2012, 2015, dan 2016.

Asprilla Dedy Perdana (2017) melakukan penelitian berjudul “Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2015” dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). Hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang mampu mencapai dan mempertahankan tingkat efisien (100%) yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Sleman. Sedangkan Kabupaten/kota yang mengalami inefisien adalah kabupaten Bantul yang hanya mampu meraih tingkat efisiensi pada tahun 2013 sebesar 69,1%, tahun 2014 sebesar 64,41%, dan pada tahun 2015 sebesar 65,24%.

Duta Sabiila Rusydi, Dewi Kusuma Wardani, Salman A. Totalia (2015) melakukan penelitian berjudul “Analisis Efisiensi Relatif Penggunaan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pada Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 – 2012” dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). Hasil penelitiannya yaitu masih banyak beberapa daerah yang belum mencapai tingkat efisiensi relatif dalam penggunaan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan di Jawa Tengah.

## **Landasan Teori**

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari hasil sumber-sumber yang ada di daerah tersebut yang diambil berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari:

- a) Bagian daerah dari PBB, BPHTB, dan penerimaan SDA
- b) Dana Alokasi Umum
- c) Dana Alokasi Khusus

### **Lain-Lain Pendapatan Yang Sah**

Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan daerah yang tidak berasal dari PAD dan dana perimbangan, dimana terdiri dari dana hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Berikut rincian lain-lain pendapatan yang sah antara lain:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan Bunga
- d) Keuntungan selisih dari nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e) Hasil dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah

### **Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar**

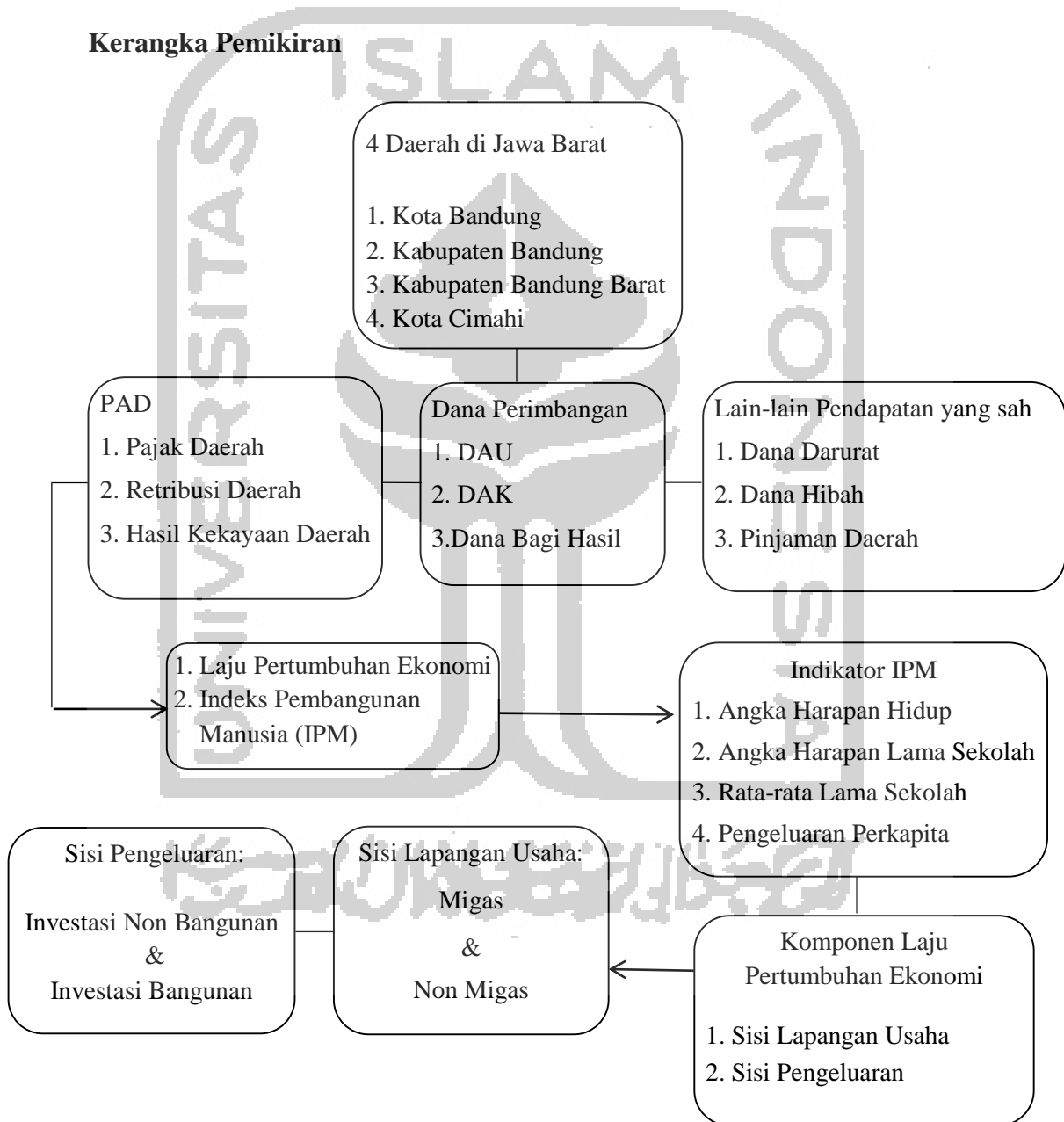
Menurut Harrod-Domar, pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh dalam jangka panjang yang disebabkan oleh beberapa syarat yang diperlukan dalam perekonomian. Fungsi produksi dalam teori ini adalah ketika modal hanya menciptakan suatu tingkat output tertentu, ketika kombinasi modal berubah maka output yang dihasilkan juga berubah. Dalam menumbuhkan perekonomian maka dibutuhkan adanya stok modal berupa investasi-investasi baru.

### **Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan besaran tingkat penduduk yang dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh

pendapatan, pendidikan, dan kesehatan yang layak [Badan Pusat Statistik]. Suatu daerah bisa dikatakan berhasil dalam pembangunan wilayahnya dapat diukur menggunakan beberapa parameter, salah satunya IPM atau *Human Development Indeks* (HDI) dimana IPM menggunakan 3 indikator yakni angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita.

### Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



## **Metodologi Penelitian**

### **Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode *Data Envelopment Analysis* (DEA), dalam metode ini memerlukan data variabel yang terdiri dari variabel input dan variabel output, suatu Unit Kegiatan Ekonomi (UKE). Variabel input dan output yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu :

#### **1. Variabel Input**

##### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya.

##### **Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

##### **Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Merupakan pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Pendapatan ini antara lain yaitu dari hibah, dana darurat, pinjaman daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **2. Variabel Output**

##### **Pertumbuhan Ekonomi**

Merupakan peningkatan dalam sistem perekonomian atau pertumbuhan ekonomi berdasarkan nilai tambah dari produksi barang dan jasa masyarakat daerah (PDRB) yang bersangkutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

##### **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Merupakan indeks pembangunan manusia yang mengukur capaian dari pembangunan antara lain yaitu pencapaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah yang merupakan acuan untuk mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan, serta kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata pengeluaran perkapita. Ukuran dari IPM merupakan salah satu variabel dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam sistem perekonomian wilayah.

## **Metode Analisis dan Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis frontier dengan pendekatan non-parametrik yaitu Data Envelopment Analysis (DEA). Dimana pendekatan non-parametrik

lebih sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan karena penelitian ini memiliki asumsi varian yang berbeda satu sama lain, memiliki perbedaan pada satuan pengukuran serta data yang digunakan berjenis nominal. Selain itu, DEA merupakan suatu metodologi yang digunakan untuk mengetahui nilai efisiensi dari suatu unit pengambilan keputusan atau unit kerja yang bertanggung jawab menggunakan sejumlah input untuk memperoleh suatu output yang ditargetkan.

### Nilai Manajerial DEA

1. Nilai rasio efisiensi bersifat relatif, berarti DEA menghasilkan efisiensi untuk setiap UKE yang relatif terhadap sampel unit lain. Hal ini dapat digunakan untuk melihat unit ekonomi yang membutuhkan perbaikan manajerial atau yang membutuhkan perhatian dan merencanakan tindakan perbaikan UKE yang tidak/kurang efisien
2. DEA menunjukkan unit ekonomi yang memiliki efisiensi sempurna dengan nilai 100% dan yang kurang efisien dengan nilai <100%. jika suatu UKE kurang efisien (efisien < 100%) maka DEA dapat menunjukkan sejumlah UKE yang memiliki efisiensi sempurna (efficient reference set, efisiensi = 100%) dan seperangkat angka pengganda (multipliers) yang dapat digunakan oleh Instansi untuk menyusun strategi perbaikan atau angka multiplier yang digunakan sebagai dasar perbaikan manajerial.
3. DEA menyajikan matriks efisiensi silang yang dapat menunjukkan unit kegiatan ekonomi (UKE) efisiensi dengan input berbeda dan menghasilkan output yang berbeda dengan unit kegiatan ekonomi (UKE) yang lain.

### Model Constant Return To Scale (CRS)

Model ini diartikan jika ada penambahan input sebesar x kali, maka output juga mengalami peningkatan sebesar x kali. Asumsi lain yang digunakan dalam model ini adalah bahwa setiap perusahaan atau Decision Making Unit (DMU) beroperasi pada skala yang optimal.

Rumus dari constant return to scale dapat dituliskan sebagai berikut:

Max  $\Theta$  (Efisiensi DMU Model CRS)

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} \theta_j \geq \theta_i \quad i = 1, 2, \dots, m$$

$$\sum_{r=1}^s y_{rj} \theta_j \geq y_{r0} \quad r = 1, 2, \dots, s$$

$$\sum_{j=1}^n \theta_j \geq 0 \quad j = 1, 2, \dots, n$$

Di mana:

$\Theta$  = efisiensi teknis (CRS)

n = jumlah DMU

m = jumlah input

s = jumlah output

$x_{ij}$  = jumlah input tipe ke-i dari DMU ke-j

$y_{rj}$  = jumlah output tipe ke-r dari DMU ke-j

$\theta_j$  = bobot DMU j untuk DMU yang dihitung

Nilai efisiensi selalu kurang atau sama dengan 1. DMU yang nilai efisiensinya kurang dari 1 berarti inefisiensi, sedangkan DMU yang nilai efisiensinya sama dengan 1 berarti efisien.

### Model Variable Return To Scale (VRS)

Model diartikan sebagai tambahan input sebesar x kali tidak akan menyebabkan output meningkat sebesar x kali, bisa lebih kecil atau lebih besar dari x kali. Peningkatan proporsi dapat bersifat increasing return to scale (IRS) atau bersifat decreasing return to scale (DRS). Hasil model ini menambahkan kondisi convexity bagi nilai-nilai bobot, dengan memasukkan dalam model batasan berikut:

$$\sum_{j=1}^n x_j = 1$$

Selanjutnya model BCC dapat ditulis dengan persamaan berikut:

Max (Efisiensi DMU Model VRS)

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} \theta'_{ij} \geq x_{i0} \quad i = 1, 2, \dots, m$$

$$\sum_{j=1}^n y_{rj} \theta'_{rj} \geq y_{r0} \quad r = 1, 2, \dots, s$$

$$\sum_{j=1}^n \theta'_{j} \geq 1 \quad (\text{VRS})$$

$$\theta'_{j} \geq 0 \quad j = 1, 2, \dots, n$$

$\theta$  = efisiensi teknis (VRS)

n = jumlah DMU

m = jumlah input

s = jumlah output

$x_{ij}$  = jumlah input ke-i dari DMU ke-j

$y_{rj}$  = jumlah output ke-r dari DMU ke-j

$\theta'_{j}$  = bobot DMU j untuk DMU yang dihitung

Nilai dari efisiensi tersebut selalu kurang atau sama dengan 1. DMU yang nilai efisiensinya kurang dari 1 berarti inefisiensi sedangkan DMU yang nilainya sama dengan 1 berarti efisien.

### Hasil Analisis dan Pembahasan

#### Nilai Efisiensi 4 Daerah di Jawa Barat Tahun 2011-2015

Tahun	Daerah			
	Kota Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung Barat	Kota Cimahi
2011	1,000	0,583	1,000	1,000
2012	1,000	1,000	1,000	1,000

2013	1,000	1,000	1,000	1,000
2014	1,000	0,613	1,000	1,000
2015	1,000	0,767	0,854	1,000

Gambar 1.2 Hasil Analisis dan Pembahasan

Pada Kota Bandung terlihat nilai efisiensi sebesar 1,000 dari tahun 2011 hingga tahun 2015, dibuktikan dengan besaran input dan output original value sebanding dengan besaran projected value. Tingkat laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung cukup tinggi dibandingkan beberapa daerah di Jawa Barat. Hal ini disebabkan sejak tahun 2011, pertumbuhan lapangan usaha di sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial di Kota Bandung terus meningkat hingga mencapai 11,56% di tahun 2015. Selain itu, jenis lapangan usaha yang menyumbang pertumbuhan ekonomi paling tinggi yakni pada kategori informasi dan komunikasi yang mencapai 16,47% pada tahun 2015, dimana penggunaan media sosial dan meningkatnya transaksi online yang membutuhkan data internet sehingga permintaan atas jasa informasi dan komunikasi sangat tinggi. Kemudian IPM Kota Bandung yang terus meningkat tiap tahunnya diikuti indikator IPM yakni Angka Harapan Hidup (AHH), Mean Years of Schooling (MYS) atau rata-rata lama sekolah, Expected Years of Schooling (EYS) atau angka harapan sekolah, dan pengeluaran perkapita. AHH Kota Bandung terus meningkat mencapai 73,82 tahun, MYS mencapai 10,52 tahun yang menandakan rata-rata lama sekolah masyarakat Kota Bandung kurang lebih 10 tahun atau setara Sekolah Menengah Atas (SMA), EYS sebesar 13,63 tahun dan pengeluaran perkapita mencapai 15608,85.

Kabupaten Bandung pada tahun 2012 dan tahun 2013 menghasilkan nilai yang efisien dibuktikan dengan besaran input dan output original value sebanding dengan besaran projected value. Namun ada beberapa periode yang menghasilkan nilai yang tidak efisien tahun 2011 sebesar 0,583, tahun 2014 sebesar 0,613, dan tahun 2015 sebesar 0,767. Berdasarkan data yang sudah diolah terdapat radial movement pada PAD atau menunjukkan perlunya peningkatan nominal PAD sehingga bisa mencapai nilai yang efisien. Kemudian pada dana perimbangan juga mengalami slack movement dan radial movement, yang artinya perlu pengurangan dana yang kurang diperlukan sehingga dana yang didapat bisa lebih meningkat. Pada variabel input lain-lain pendapatan yang sah terdapat slack movement dan radial movement yang menandakan adanya pemborosan atau penggunaan pendapatan yang konsumtif dan perlunya peningkatan nominal input lain-lain pendapatan yang sah sehingga mencapai nilai efisien. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung bisa dikatakan berada dibawah rata-rata beberapa daerah lainnya di Jawa Barat. Sektor informasi dan komunikasi menyumbang pertumbuhan ekonomi tertinggi mencapai 16,39% tahun 2015 yang cukup tinggi jika dibandingkan daerah lainnya.

Pada Kabupaten Bandung Barat tahun 2011 hingga 2014 terlihat nilai efisiensi sebesar 1,000, dibuktikan dengan besaran input dan output original value sebanding dengan besaran projected value. Namun pada tahun 2015 mencapai nilai inefisiensi sebesar 0,854, dibuktikan dari hasil olah data pada input variabel PAD terdapat radial movement yang menunjukkan perlunya pemerintah daerah meningkatkan nominal sehingga tercapai hasil yang diharapkan. Kemudian pada input dana perimbangan terdapat radial movement dan slack movement, artinya pemerintah daerah perlu mengurangi penggunaan dana yang konsumtif sehingga dana yang didapatkan bisa digunakan secara optimal. Input lain-lain pendapatan yang sah juga mengalami radial movement dan slack movement dimana perlu meningkatkan nominal input agar mencapai tingkat yang efisien terhadap peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan IPM. Tingkat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat secara data masih dibawah rata-rata keseluruhan 4 daerah di Jawa Barat.

Kota Cimahi terlihat memiliki nilai efisiensi sebesar 1,000 dari tahun 2011 hingga tahun 2015, dibuktikan dengan besaran input dan output original value sebanding dengan besaran projected value. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi sempat tinggi pada tahun 2012 sebesar 6,24% namun mengalami penurunan hingga tahun 2015. Pergerakan ekonomi yang dominan berasal dari sektor informasi dan komunikasi mencapai 20,82% tetapi mengalami fluktuasi hingga pada tahun 2015 sebesar 17,59%. Sektor agraris masih rendah walaupun terus meningkat hingga tahun 2015 mencapai 4,84%. IPM Kota Cimahi juga mengalami peningkatan tiap tahunnya berdasarkan faktor indikator yakni AHH mencapai 73,58 tahun, EYS mencapai 13,73 tahun, MYS mencapai 10,78 tahun atau setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan pengeluaran perkapita sebesar 11011,88.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

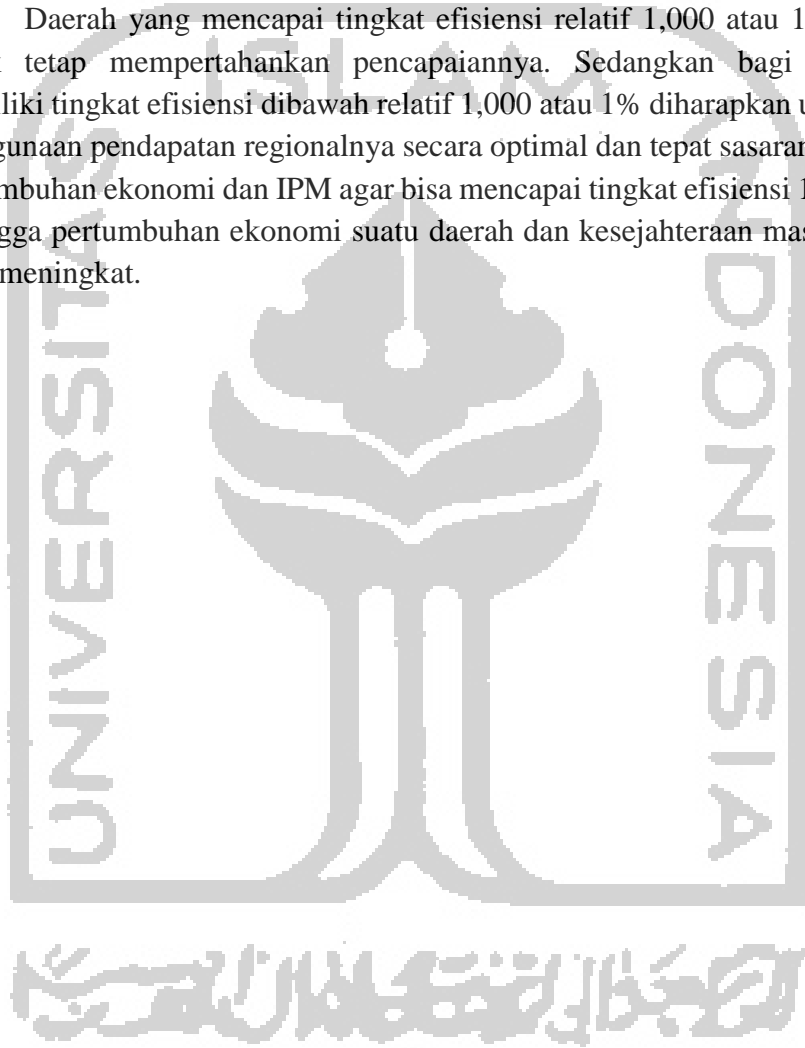
1. Hasil pengujian efisiensi di Kota Bandung tahun 2011-2015 menghasilkan efisiensi sebesar 1,000, yang menandakan bahwa alokasi pendapatan daerah terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan IPM dilakukan secara optimal dan tepat sasaran.
2. Hasil pengujian efisiensi Kabupaten Bandung pada tahun 2012 dan 2013 menghasilkan efisiensi sebesar 1,000 dimana menunjukkan bahwa alokasi pendapatan daerah terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan IPM dilakukan secara optimal dan tepat sasaran. Namun pada tahun 2011, 2014, dan 2015 menghasilkan tingkat efisiensi dibawah 1,000 atau dikatakan inefisiensi sebesar 0,583, 0,613, dan 0,767 yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum optimal dalam pengalokasian pendapatan daerah terhadap terwujudnya laju pertumbuhan ekonomi dan IPM yang layak.
3. Hasil pengujian efisiensi Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2011-2014 menghasilkan efisiensi sebesar 1,000 dimana menunjukkan bahwa alokasi pendapatan daerah terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan IPM dilakukan secara optimal dan tepat sasaran. Namun pada tahun 2015 menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 0,854 yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum optimal dalam pengalokasian

pendapatan daerah terhadap terwujudnya laju pertumbuhan ekonomi dan IPM yang layak.

4. Hasil pengujian efisiensi Kota Cimahi pada tahun 2011-2015 menghasilkan efisiensi sebesar 1,000 dimana menunjukkan bahwa alokasi pendapatan daerah terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan IPM dilakukan secara optimal dan tepat sasaran.

#### **Implikasi**

Daerah yang mencapai tingkat efisiensi relatif 1,000 atau 1% diharapkan untuk tetap mempertahankan pencapaiannya. Sedangkan bagi daerah yang memiliki tingkat efisiensi dibawah relatif 1,000 atau 1% diharapkan untuk menjaga penggunaan pendapatan regionalnya secara optimal dan tepat sasaran terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan IPM agar bisa mencapai tingkat efisiensi 1,000 atau 1%, sehingga pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2013, Juni). Hubungan Jumlah Wisatawan Jumlah Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel. *Jurnal Emba*, 1(3), 664-672.
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Kota Bandung Dalam Angka 2012*. Bandung: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Kota Bandung Dalam Angka 2013*. Bandung: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Kota Bandung Dalam Angka 2014*. Bandung: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Kota Bandung Dalam Angka 2016*. Bandung: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2012*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2013*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2014*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2016*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Kabupaten Bandung Dalam Angka 2012*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Kabupaten Bandung Dalam Angka 2013*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Kabupaten Bandung Dalam Angka 2014*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Kabupaten Bandung Dalam Angka 2016*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Kota Cimahi Dalam Angka 2012*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Kota Cimahi Dalam Angka 2013*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Kota Cimahi Dalam Angka 2014*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Kota Cimahi Dalam Angka 2016*. BPS.
- Hartawan, T. (2017, Mei 5). *BPS: Sektor Informasi Komunikasi Penyumbang Ekonomi Tertinggi*. Jakarta: Tempo.
- Hertanto, I., & Sriyana, J. (2011). Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dan Kota. 12(1).
- Hukum Online. (2016, Mei 3). *Empat Catatan Terkait Perda Penghambat Investasi di Daerah*. Retrieved agustus 5, 2019, from <https://hukumonline.com/berita/baca/lt57289fcf75b4c/>
- Kemendagri. (2012). *Perda Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2012 Tentang izin gangguan dan retribusi Izin Gangguan*. Retrieved Agustus 5, 2019, from [https://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA\\_BANDUNG\\_19\\_2012.pdf](https://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA_BANDUNG_19_2012.pdf)
- Kemenkeu. (2004). *Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Retrieved Juli 17, 2019, from <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=367>
- Kemenkeu. (n.d.). *Dana Alokasi Umum*. Retrieved Agustus 6, 2019, from <https://www.dipk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01/DAU.pd>
- Mulyadi. (2007). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Salemba Empat.
- PPID Kota Bandung. (n.d.). *PDRB Kota Bandung 2011-2015*. Retrieved Agustus 6, 2019, from <https://www.ppid.bandung.go.id>

- PPID Kota Bandung. (n.d.). *PDRB Kota Bandung Menurut lapangan Usaha 2011-2015*. Bandung: BPS.
- RI, D. (2004). *Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*. Retrieved Juli 18, 2019, from [www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf)
- RI, D. (2005). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan*. Retrieved Agustus 7, 2019, from <http://www.djpk.depkeu.go.id>
- Rosmaniar. (2012, Juni). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan. *Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 1(1).
- Rusydi, D. S., Wardani, D. K., & Totalia, S. A. (2015). Analisis Efisiensi RELatif Penggunaan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2012.
- S. K. (2015). *Rincian Alokasi DAU TA 2015*. Retrieved Agustus 6, 2019, from <https://www.sipuu.setkab.go.id/>
- Saqia, D. P. (2016). Analisis Perbandingan BPHTB Sebelum dan Sesudah Menjadi Pajak Daerah Dalam Memberikan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- Usman, R. (2017). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 1(1).